

23417

by cicicijeje 1

Submission date: 21-Mar-2024 07:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2325577466

File name: Bambang_Irwansyah_Lubis_Template_Jurnal_AIP_sinta3.docx (365.1K)

Word count: 4188

Character count: 30479



⁴
Kajian Keberhasilan Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* di DPMPTSP Kabupaten Ketapang Pada Perusahaan Perkebunan

⁴
Study of the Success of Implementing the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in DPMPTSP Ketapang Regency in Plantation Companies

Bambang Irwansyah Lubis^{1*}, Andreas W. Krisdiarto², Listiyani³

¹ PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Jakarta, ² Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, ³ Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta
E-mail: bambangirwansyah.lubis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Submitted: -

Accepted: -

Published: -

Keywords:

DPMPTSP,

Ketapang Regency

OSS-RBA,

Policy Implementation,

Palm Oil.

ABSTRACT

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), is a risk-based business licensing service system that is carried out online. It is important to know about the even application of the OSS-RBA Policy, because it is related to the country's national achievements in simplifying the business licensing process and attracting foreign investors. The plantation business sector, especially oil palm, is an important sector to pay attention to. The high contribution of the country's foreign exchange originating from this industry is one of the reasons for the government to make the business licensing process smooth. Ketapang Regency is one of the main locations for the palm oil industry in West Kalimantan. For this reason, this research aims to measure the level of success in implementing the OSS-RBA Policy in the Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) Ketapang Regency, especially in plantation companies. This research uses a mixed method with sampling using a purposive sampling method. The theory used is the George Edward III Policy Implementation Model. He determined four indicators that influence the implementation of a policy, namely: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of research on communication indicators show that there has been clear and consistent transmission of information from policy makers to policy implementers and to business actors. Meanwhile, in the resource indicators, equipment and authority resources have been fulfilled. For disposition, licensing services have been provided optimally. Finally, in terms of bureaucratic structure indicators, at DPMPTSP Ketapang Regency has SOPs for services and licensing activities.



¹
Copyright © Tahun Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 Presiden Indonesia menerapkan kebijakan Sistem Perizinan *Online Tunggal* atau *Online Single Submission (OSS)*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempercepat proses perizinan usaha. OSS yang merupakan sistem perizinan

terintegrasi, memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan izin secara daring melalui satu pintu layanan elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hingga saat ini, OSS telah berkembang pesat. Pada mulanya diluncurkan OSS versi 1.0 yang kemudian dialihkan menjadi OSS versi 1.1 ditahun 2019-2020. Selanjutnya, pemerintah menyempurnakan sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS Berbasis Risiko atau OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) (KOMINFO, 2021). Kebijakan OSS-RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta pengurusannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Dharmayanti & Yasa, 2022).. OSS-RBA merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan secara daring. Melalui kebijakan ini, maka perizinan berusaha yang diberikan akan dinilai terlebih dahulu berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan (DPMPTSP Jawa Barat, 2021).

Para pelaku usaha perlu segera berpindah menuju perizinan berbasis daring agar kemudahan berusaha dapat diraih, hingga mampu mendatangkan minat investor. Pada pasar global, perkebunan Indonesia merupakan bidang usaha dengan peluang besar dalam iklim investasi (Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022). Selain itu, bidang usaha perkebunan juga menjadi penyumbang besar dalam devisa negara. Pada tahun 2020, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia (Rizaty, 2022). Hingga pada tahun 2022, Indonesia telah menyumbangkan 59% dari total produksi miyak kelapa sawit dunia yang nilainya setara dengan 45,5 juta ton per tahun (Dewi, 2023). Kontribusi devisa negara dari industri perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun 2022 mencapai 50 Miliar USD, dan telah mampu menciptakan surplus neraca perdagangan Indonesia ditengah pandemi Covid-19 (Nurdifa, 2023).

Bidang usaha perkebunan Indonesia telah memberikan optimisme untuk mencapai peningkatan iklim investasi nasional. Kemudahan perizinan berusaha sama halnya dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Kemudahan perizinan ini tidak terlepas dari peran implementor, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tugas pokok dari DPMPTSP ialah pemberian pelayanan di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan berusaha (DPMPTSP Jepara, 2020). Maka dari itu, implementor utama dari kebijakan OSS-RBA ialah para pegawai di kantor tersebut.

Kebijakan OSS-RBA perlu diimplementasikan secara merata di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kaitan erat dengan kesuksesan capaian misi nasional, yang ingin mempermudah perizinan berusaha serta memperkuat iklim investasi. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang perlu diperhitungkan dalam perkembangan iklim investasi di Indonesia. Khususnya untuk Kabupaten Ketapang yang menjadi salah satu lokasi utama dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Irawan & Purwanto, 2020). Pelaku kegiatan berusaha ialah perusahaan pemilik Perkebunan Sawit Swasta Nasional dan individu pemilik Perkebunan Sawit Rakyat. Pada tahun 2017, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang telah mencapai 87.522 ha, dengan jumlah petani sebanyak 22.647 orang (Irawan & Purwanto, 2020). Perubahan kebijakan perizinan yang diurus secara daring, perlu disampaikan oleh para pelaku kegiatan berusaha ini, sehingga implementasi dari Kebijakan OSS-RBA dapat dicapai. Peran DPMPTSP Kabupaten Ketapang sebagai implementor kebijakan, menjadi tumpuan utama dalam pengimplementasian OSS-RBA kepada para sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPSTP Kabupaten Ketapang, terutama pada perusahaan perkebunan. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi Kebijakan OSS-RBA di dinas setempat. Untuk dapat memberikan analisa yang mendalam, peneliti menggunakan pemikiran George Edward III mengenai model implementasi kebijakan. George dalam (Subarsono, 2011) menetapkan empat indikator yang dapat mendorong atau menghambat implementasi dari sebuah kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara singkat, berdasarkan pemikiran George dalam (Widodo, 2009) maka sub-sub indikator dari 4 faktor pendukung maupun penghambat implementasi suatu kebijakan ialah seperti yang disajikan pada Tabel 1, berikut ini:

Tabel 1. Indikator Pendukung / Penghambat Implementasi Suatu Kebijakan (Widodo, 2009)

Indikator	Sub Indikator
1. Komunikasi	a. Transmisi
	b. Kejelasan
	c. Konsistensi
2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia
	b. Sumber Daya Anggaran
	c. Sumber Daya Peralatan
	d. Sumber Daya Kewenangan
3. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrasi
	b. Insentif
4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
	b. Fragmentasi

Untuk memberikan analisa secara mendalam, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ialah karya (Sanjaya, 2023). Penelitian tersebut berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan OSS-RBA di DPMPSTP Kota Pangkalpinang. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk memberikan penjelasan mendalam terkait pengimplementasian kebijakan tersebut, Sanjaya menggunakan pemikiran George C. Edward III sebagai alat analisisnya. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bagaimana komunikasi serta sumber daya yang dioptimalkan oleh DPMPSTP Kota Pangkalpinang mampu membawa keberhasilan dalam implementasi kebijakan OSS-RBA. Hambatan berupa jaringan internet oleh pemerintah setempat diberikan solusi berupa sosialisasi yang meluas serta pendampingan dalam pengurusan perizinan.

Kedua, ialah penelitian (Robby & Tarwini, 2019). Pada penelitiannya, Robby dan Tarwini membahas mengenai inovasi pelayanan OSS yang diterapkan di DPMPPTSP Kabupaten Bekasi. Ia menggunakan pemikiran George Edward III untuk mengukur keberhasilan pengimplementasian kebijakan tersebut. Hasil yang ditemukan ialah, tidak adanya sarana penunjang kegiatan perizinan secara *online* menjadi penghambat utama penerapakan Kebijakan OSS di DPMPPTSP Kota Bekasi. Namun, secara keseluruhan dinas terkait telah dengan baik dalam upaya mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sosialisasi, pembuatan SOP, serta komitmen dari para implementor sudah menunjukkan upaya yang cukup baik.

Penelitian ketiga merupakan tulisan (Fadhilah & Prabawati, 2019). Keduana berfokus dalam menjabarkan implementasi OSS di DPMPPTSP Kabupaten Nganjuk. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. 4 variabel keberhasilan impelmentasi kebijakan hasil pemikiran George Edward III digunakan sebagai alat analisa penelitian. Hasilnya, sudah dilaksanakan sosialisasi, terdapat staf yang kompeten sebagai implementor kebijakan, fasilitas serta struktur birokrasi juga terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya, terdapat penelitian (Maulidya, 2021). Maulidya memfokuskan penelitian pada kebijakan OSS yang diimplementasikan oleh DPMPPTSP Kota Salatiga. Jenis penelitian tersebut ialah kualitatif dengan pendekatan induktif. Maulidya menggunakan metode wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data. Ia menerapkan pemikiran George Edward III agar dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dimaksudkan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa DPMPPTSP setempat telah cukup baik mengimplementasikan kebijakan OSS. Namun, peran pemerintah masih cenderung kurang, jumlah SDM terbatas serta sarana prasarana menjadi faktor penghambat pengimplementasian kebijakan, sehingga masih perlu ditingkatkan.

Terkahir, penelitian (Nurhayati et al., 2022) terkait implementasi OSS pada pelayanan usaha di DPMPPTSP Kabupaten Enrekang. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan wawancara. Nurhayati dkk. menggunakan pemikiran George Edward III sebagai landasan menetapkan indikator pendorong dan penghambat implementasi kebijakan. Hasilnya, faktor pendorong seperti ketersediaan staf yang berkompeten serta SOP dan fasilitas pendampingan sudah dimiliki oleh DPMPPTSP Kabupaten Enrekang. Namun, seperti halnya kebanyakan kota di Daerah Timur Indonesia, akses internet masih menjadi kendali dalam pelaksanaan kegiatan perizinan berbasis daring. Kemudian pelaku usaha masih banyak yang belum memahami perubahan kebijakan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah *mixed methods*. Menurut Creswell (2014) penelitian campuran ialah metode penelitian yang menggabungkan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2014). Pada penelitian ini, digunakan Metode Campuran Konkuren dengan Strategi *Embedded* Konkuren. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan secara bersamaan (Creswell, 2014). Metode primer yang digunakan ialah kualitatif, sementara metode sekundernya adalah kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 – Februari 2024. Penelitian dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang sebagai kantor baru DPMPPTSP yang

beralamat di Lapangan Sepakat, Jalan Sisingamaraja, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Informan penelitian dalam tulisan ini ditentukan melalui metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dalam (Fauzy, 2019), dijelaskan sebagai teknik pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengambil informan secara acak, tetapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Peneliti memiliki karakteristik tertentu dalam menetapkan informan penelitian, yakni dengan pertimbangan bahwa informan merupakan orang yang paling tahu tentang implementasi OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Peneliti menetapkan 4 responden dari kelompok implementor kebijakan, dan 35 responden untuk kelompok perusahaan perkebunana kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, sumber data primer, yakni data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya (Silalahi, 2009). Bentuknya hasil wawancara dan angket. Kedua, sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lainnya. Dalam tulisan Silalahi (2009) yang dikatakan sebagai data sekunder ialah data yang bersumber dari tangan kedua. Bentuknya dapat berupa laporan dan hasil survei dari institusi terkait (Silalahi, 2009). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi.

Untuk Analisa data kualitatif dilakukan dengan metode analisa model Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2009). Terdapat tiga tahap dalam data model ini, yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi (Silalahi, 2009). Sementara itu, data kuantitatif dianalisa dengan skala *likert*. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan dikonversikan dengan 4 skala (Sugiyono, 2017). Persentase keberhasilan dalam analisa skala *likert* dapat dihitung secara matematis menggunakan persamaan *rating scale* sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

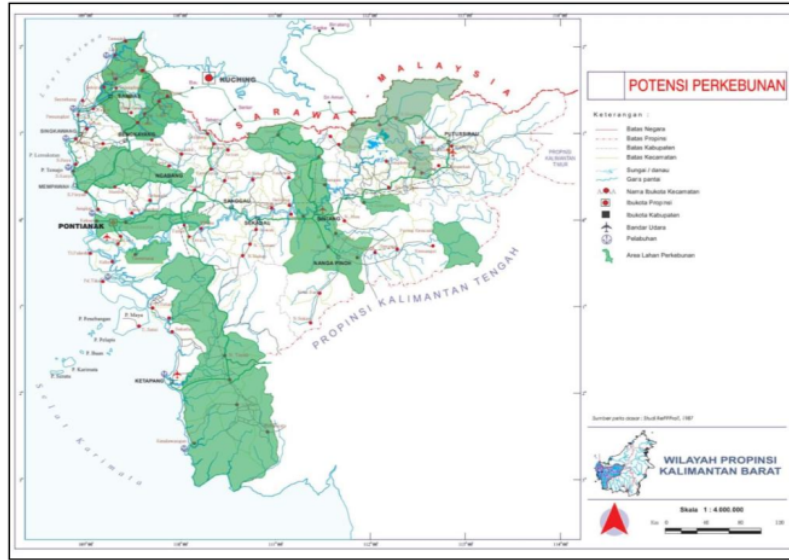
$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{\sum \text{Skor Observasi}}{\sum \text{Skor Ideal}} \times 100 \% \quad (1)$$

Hasil dari persentase keberhasilan kemudian akan digolongkan sesuai kategorinya. Pembagian kategori keberhasilan diperoleh dari membagi rentang bilangan persentase sesuai dengan skala *likert*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang merupakan daerah dengan potensi perkebunan yang sangat besar. Sesuai dengan gambar 2. wilayah yang berwarna hijau merupakan areal lahan perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang melalui gambar tersebut terlihat memiliki lahan yang luas untuk kegiatan perkebunan. Salah satu komoditas utama perkebunan di Kabupaten Ketapang ialah kelapa sawit. Pada pengurusan perizinan berusaha perkebunan kelapa sawit, maka DPMPTSP Kabupaten Ketapang menjadi instansi utamanya.



Gambar 2. Peta Potensi Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (DMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, 2023)

Saat ini, pengurusan perizinan sudah dilakukan secara daring melalui OSS-RBA. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka DPMPTSP dari setiap daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Kebijakan OSS-RBA. **S** secara spesifik wewenang pelaksanaan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang tertuang dalam **Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.** (Bupati Ketapang, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode penyebaran kuesioner, maka diperoleh hasil persentase keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Persentase Keberhasilan Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No.	Indikator	Persentase Keberhasilan (Implementor Kebijakan)	Nilai Skala Likert	Persentase Keberhasilan (Pelaku Usaha Perkebunan)	Nilai Skala Likert
1.	Komunikasi	83%	Sangat Berhasil	90%	Sangat Berhasil

2.	Sumber Daya	75%	Berhasil	87%	Sangat Berhasil
3.	Disposisi	75%	Berhasil	92%	Sangat Berhasil
4.	Struktur Organisasi	85%	Sangat Berhasil	83%	Sangat Berhasil

Pelaksanaan Indikator Komunikasi Pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki tiga dimensi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, komunikasi yang diharapkan ialah komunikasi antara *policy maker* dengan para implementor dan sasaran kebijakan. Sementara pada dimensi kejelasan, hal-hal yang menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam implementasi kebijakan antar implementor, sasaran kebijakan, dan pihak lain yang terlibat harus dihindari. Sementara itu, dimensi konsistensi diperlukan agar menjauhkan kebijakan dari kesimpang siuran yang menimbulkan kebingungan para implementor kebijakan, sasaran, serta pihak lainnya yang saling terhubung. (Widodo, 2009)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa indikator komunikasi di DPMPTSP Kabupaten memperoleh nilai “sangat berhasil” oleh implementor kebijakan serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Melalui wawancara, diketahui bahwa seluruh dimensi yang dimiliki oleh indikator ini telah terpenuhi. Pertama, dimensi transmisi informasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama para implementor kebijakan, diketahui bahwa *policy maker* yang dalam hal ini merupakan pemerintah pusat telah mentransmisikan informasi mengenai pelaksanaan OSS-RBA. Kemudian, para pelaku usaha juga mengakui adanya transmisi informasi mengenai OSS-RBA dari implementor kebijakan di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Kedua, dimensi kejelasan informasi. Melalui wawancara bersama para responden, diketahui jika informasi yang didapatkan dari masing-masing sumber sudah cukup jelas. Ketiga, dimensi konsistensi. Pada proses perizinan menggunakan OSS-RBA, implementor kebijakan dan pelaku usaha sepakat bahwa informasi mengenai kebijakan ini selalu konsisten.

Melalui hasil observasi, peneliti mengetahui bahwa DPMPTSP Kabupaten Ketapang memiliki *website* dan Instagram sebagai media penyebaran informasi. Berbagai informasi terkait dengan produk pelayanan OSS-RBA dapat diakses melalui <http://dpmptsp.ketapangkab.go.id/> maupun pada akun Instagram *ketapang_investment* dan *mppketapang*. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil wawancara, hasil perhitungan kuesioner mengenai indikator komunikasi serta observasi lapangan, dapat ditetapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Ketapang.

Optimalisasi Indikator Sumber Daya Pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Merujuk pada pemikiran George, maka sumber daya yang diperlukan ialah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya

manusia menjadi penting, karena meskipun isi tujuan dan sasaran telah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi jika tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai maka kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan secara optimal.⁹ Sementara pada sumber daya anggaran, jika terjadi keterbatasan anggaran akan mengakibatkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada sasaran kebijakan dapat menjadi terbatas. (Widodo, 2009)

Untuk sumber daya peralatan, meliputi adanya sarana untuk melaksanakan kebijakan seperti gedung, peralatan elektronik, internet, dan sebagainya. Pada sumber daya kewenangan, hal ini meliputi adanya kewenangan yang dimiliki oleh implementor kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting bagi implementor kebijakan, karena ketika menghadapi permasalahan mereka perlu segera menyelesaikannya dengan suatu keputusan. (Widodo, 2009)

Melalui Tabel 2. Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai pada persentase keberhasilan antara milik implementor kebijakan dengan pelaku usaha perkebunan. Nilai persentase keberhasilan dari implementor kebijakan ialah “berhasil”, sedangkan para pelaku usaha perkebunan “sangat berhasil”. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPPTSP Kabupaten ketapang.

⁹ Terdapat dua sub indikator yang menjadi pendorong dalam keberhasilan indikator ini, yakni sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Pertama mengenai sumber daya peralatan. DPMPPTSP Kabupaten dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan OSS-RBA telah memiliki fasilitas berupa koneksi internet, komputer, printer, mesin antrian, ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang rapat, ruang laktasi, ruang bermain anak, tempat ibadah, toilet, petunjuk arah lokasi. Fasilitas yang ada sudah optimal dalam menunjang pelayanan di dinas terkait. Kedua sumber daya kewenangan. Hal ini sudah diberikan secara mandatori dan tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara terdapat sub indikator yang masih kurang optimal dalam pemenuhannya. Pertama, berkaitan dengan sumber daya manusia. Disampaikan oleh para implementor, bahwa jumlah pegawai di dinas setempat masih belum kurang memadai. Selain itu, untuk pegawai di DPMPPTSP Kabupaten Ketapang dipandang oleh implementor kebijakan masih kurang menguasai regulasi dan sistem. Sehingga, diperlukan peningkatan mutu bagi para pegawai setempat.

Kedua, sumber daya anggaran. Menurut implementor kebijakan, anggaran untuk menjalankan Kebijakan OSS-RBA tidak disertai dengan dana operasional yang cukup. Sejak awal perilisan Kebijakan OSS-RBA di DPMPPTSP Kabupaten Ketapang dipraktikkan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut para implementor seharusnya telah dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Apabila dianggarkan melalui APBN, maka implementor kebijakan dapat memberikan fasilitas yang mendukung proses perizinan melalui OSS-RBA dengan lebih optimal.

Dengan demikian, perbaikan dan optimalisasi terutama dalam sub indikator sumber daya manusia dan sumber daya anggaran perlu dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena akan berdampak bagi tingkat keberhasilan dan kelancaran implementasi OSS-RBA itu sendiri. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan skala *likert* maka indikator sumber daya dapat dinyatakan sebagai faktor pendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPPTSP

Kabupaten Ketapang. Sub indikator sumber daya peralatan dan wewenang menjadi faktor yang paling mendorong keberhasilan indikator ini.

Pelaksanaan Indikator Disposisi Pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

George memaknai disposisi sebagai watak atau sikap yang dimiliki para implementor. Ada dua indikator untuk mengetahui disposisi dalam implementasi kebijakan, yakni pengangkatan birokrasi dan insentif. Disposisi atau sikap implementor kebijakan dapat memunculkan hambatan dalam implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak mau melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat yang lebih atas. Untuk itu, pengangkatan personel implementor kebijakan harus merujuk pada orang-orang dengan dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Terkait indikator insentif, hal ini dilakukan oleh para pembuat kebijakan kepada para implementor. Tujuannya agar mendorong para implementor kebijakan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan yang diharapkan. (Widodo, 2009)

Pada wawancara bersama implementor kebijakan, ditunjukkan bahwa ada antusiasme dari implementor kebijakan dalam menyambut sistem OSS-RBA. Selain berupaya dalam memberikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu, DPMPTSP Kabupaten Ketapang mengeluarkan program melalui “Petasan” atau Pekan Interaksi Rabu Mendata, Kamis Wisata, Jumat Melayani. Pada program tersebut, DPMPTSP Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi ke Perusahaan-perusahaan kecil di berbagai kecamatan yang memiliki kendala dalam pengurusan perizinan. Diketahui bahwa produk perizinan yang mendominasi dalam program tersebut ialah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Masyarakat mengaku puas dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ketapang, hal ini penulis amati melalui data pada Tabel 3, berikut ini:

Tabel 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ketapang Tahun 2023 (DPMPTSP Kabupaten Ketapang, 2023)

No.	Waktu Pelaksanaan Survei	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
1.	Triwulan I Tahun 2023	98,49
2.	Triwulan II Tahun 2023	99,12
3.	Triwulan III Tahun 2023	99,65
4.	Triwulan IV Tahun 2023	99,65

Sementara itu, para implementor kebijakan masih memandang bahwa insentif berupa gaji yang ada belum cukup memotivasi. Adanya penggunaan anggaran APBD untuk menjalankan program-program dalam Kebijakan OSS-RBA menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi ini. Para implementor berharap adanya anggaran melalui APBN agar kegiatan seperti dalam agenda “Petasan” dapat dioptimalkan dan dilakukan secara menyeluruh.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator disposisi dapat ditetapkan sebagai faktor yang mendorong keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan skala *likert* dan hasil wawancara. Meskipun demikian, perbaikan dan optimalisasi terutama pada sub indikator insentif perlu diperhitungkan. Insentif memiliki kaitan erat dengan performa kerja, insentif juga menjadi alat yang dapat mewujudkan kelengkapan fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Untuk itu, pemenuhan insentif menjadi indikator yang perlu dipenuhi agar dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik.

Optimalisasi Indikator Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

George menjelaskan jika aspek struktural yang paling mendasar dari organisasi ialah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). Suatu lembaga atau instansi pemerintah memerlukan struktur birokrasi yang lengkap dan terstruktur agar implementor kebijakan juga menjadi jelas. Selain SOP, fragmentasi menjadi salah satu karakteristik dari birokrasi. Fragmentasi oleh George diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada beberapa instansi yang berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi. Pada struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah), dapat meningkatkan kemungkinan gagalnya komunikasi karena peluang instruksi terdistorsi sangat besar. (Widodo, 2009)

Melalui wawancara kepada kedua pihak dinyatakan jika sub indikator SOP dan fragmentasi telah terpenuhi. Pada observasi peneliti diketahui bahwa struktur birokrasi dan SOP DPMPTSP dapat diakses melalui *website* yang ada. SOP tersebut tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 861/DPMPTSP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sementara itu, untuk standar pelayanan tercantum pada Keputusan Bupati Nomor 860/DPMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Terkait fragmentasi, pelaksanaannya telah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tanggung jawab, kerjasama, serta alur perizinan yang melibatkan dinas lainnya sudah dapat berlangsung cukup baik dan lancar. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, persentase dari hasil kuesioner serta observasi peneliti di lapangan, maka indikator struktur birokrasi dinyatakan sebagai faktor pendorong dalam implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari kegiatan wawancara, jawaban kuesioner, observasi, serta data primer maupun sekunder dengan masing-masing indikator pendorong / penghambat implementasi kebijakan yang peneliti analisa, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang telah berhasil terlaksana dengan baik.

Kedua, terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Pada indikator komunikasi, terjadi transmisi informasi yang

dilakukan antara *policy maker* dengan implementor kebijakan dan sasaran kebijakan. Informasi diberikan secara jelas dan konsisten. Terkait indikator sumber daya, maka keberhasilan di dorong dari pemenuhan sumber daya perlatan dan sumber daya kewenangan. Pada indikator disposisi, pengangkatan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara optimal dan berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka menjadi pendorong keberhasilan indikator tersebut. Sementara itu, pada struktur birokrasi keberhasilan dicapai dengan adanya SOP yang juga telah dijalankan dengan baik. Selain itu, DPMPSTSP Kabupaten Ketapang mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinasi-dinas terkait lainnya dengan lancar dalam pengurusan perizinan melalui OSS-RBA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Terutama kepada para responden penelitian yang berasal dari DPMPSTSP Kabupaten Ketapang, dan para pelaku usaha dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Ketapang. (2022). Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang (pp. 1–11). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/271784/2022perbupketapangkab46%20ocr.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi Ketiga). Pustaka Belajar.
- Dewi, R. (2023). 10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Jadi Produk Unggulan dan Penopang Devisa. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483272/10-komoditas-ekspor-indonesia-yang-jadi-produk-unggulan-dan-penopang-devisa>
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>
- DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Lokasi Potensi Perkebunan. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/0B5zQQO52Jkv5bDINYNFFnlaTEE/preview?usp=embed_face_book
- DPMPSTSP Jawa Barat. (2021). OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). <https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/pages/detail/271-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/267>
- DPMPSTSP Jepara. (2020). Tugas Pokok dan Fungsi. <https://dpmptsp.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Fauzy, A. (2019). *Metode Sampling* (2nd ed.). Universitas Terbuka. https://pak.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/B1-Buku-1-ok_Metode-Sampling.pdf
- DPMPSTSP Kabupaten Ketapang. (2023). *Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Ketapang Bulan Oktober—Desember 2023*.
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Nganjuk. *E-Journal UNESA*, 7(4), 1–8.
- Irawan, U. S., & Purwanto, E. (2020). Profil Sawit Rakyat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (pp. 1–106). Tropenbos Indonesia. <https://www.tropenbos-indonesia.org/resources/publications/profile%20of%20smallholder%20oil-palm%20plantation%20in%20ketapang%20district>
- Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). Perkebunan Indonesia Kian Dilirik Pasar Global, Peluang Besar Berinvestasi Terbuka Lebar. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/perkebunan-indonesia-kian-dilirik-pasar-global-peluang-besar-berinvestasi-terbuka-lebar/>

- KOMINFO. (2021). Presiden Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <http://content/detail/36235/presiden-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko/0/berita>
- Maulidya, A. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal berbasis Online Single Submission di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah* [Institut Pemerintahan dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/6116/1/3%20RINGKASAN%20LA_ARYUNISDA%20MUSLI%20MAULIDYA_28.0635_IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PELAYANAN%20TERPADU%20SATU%20PINTU%20BIDANG%20PENANAMAN%20MODAL%20BERBASIS%20ONLINE%20SINGLE%20SUBMISSION%20DI%20KOTA%20SALATIGA%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH.pdf
- Nurdifa, A. R. (2023). Makin Moncer, Indsutri Sawit Sumbang Devisa US\$50 Miliar Sepanjang 2022. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230814/257/1684715/makin-moncer-indsutri-sawit-sumbang-devisa-us50-miliar-sepanjang-2022>
- Nurhayati, Maldun, S., & Nurkaidah. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan usaha Pada Dinas Penanaman Midal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67–78.
- Rizaty, M. A. (2022). 10 Ekspor Pangan dan Perkebunan Terbesar RI, Minyak Sawit Teratas. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/10-ekspor-pangan-dan-perkebunan-terbesar-ri-minyak-sawit-teratas>
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi. *Administratio*, 10(2), 51–57.
- Sanjaya, J. (2023). *Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung* [Institut Pemerintahan dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/13196/1/JEXINGLYSANJAYA-30.0384-IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20ONLINE%20SINGLE%20SUBMISIION%20RISK%20BASED%20APPROACH%20DLAM%20PERIZINAN%20BERUSAHA%20DI%20DPMPSTP%20KOTA%20PANGKALPINANG%20PROVINSI%20BANGKA%20BELITUNG.pdf>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial* (3rd Edition). PT Refika Aditama.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Cetakan Ke-9). Alfabeta.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Cetakan Ketiga). Bayumedia.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Politeknik Negeri Lampung Student Paper	6%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
4	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
6	www.infosawit.com Internet Source	1%
7	Muhammad Revki Iboyma, Agus Sjafari, Juliannes Cadith. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2023 Publication	1%



channel9.id

Internet Source

1%



www.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On